
Peran UNICEF dalam Membantu Upaya Republik Dominika Mengurangi Kasus Pernikahan Anak

Ayu Eva Sattvika Devi¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, A.A Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengurangi kasus pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika. Dalam menganalisis upaya tersebut peneliti menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi internasional dan konsep gender dalam *Sustainable Development Goals*. Penelitian ini menemukan dalam upayanya menanggulangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika, UNICEF menjalankan perannya sebagai instrumen dengan membantu pemerintah Republik Dominika mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingannya dalam mencapai SDGs. Sebagai instrumen, UNICEF menjalankan fungsinya sebagai tempat memperoleh informasi dengan membantu badan statistik Republik Dominika menyediakan data mengenai kasus pernikahan anak melalui survei MICS-ENHOGAR 2014, CAP-MIUT 2018 dan MICS-ENHOGAR 2019. Sementara sebagai arena UNICEF menjalankan fungsi penerapan kebijakan dengan menyediakan tempat bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia dengan program regional terkait pernikahan anak. Dalam menjalankan perannya sebagai aktor, UNICEF menjalankan fungsi sosialisasi dengan kampanye berbasis C4D dan edukasi berbasis hiburan dengan pembuatan film *La Peor Novela* yang bertemakan pernikahan anak yang terjadi. Sebagai aktor, UNICEF juga menjalankan fungsi norma dengan mendorong pemerintah Republik Dominika mengubah batas minimal untuk menikah pada KUH Perdatanya. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut tidak lepas dengan kekuatan otoritas moral yang dimiliki oleh UNICEF untuk memengaruhi Republik Dominika dalam pengambilan kebijakannya dalam menangani kasus pernikahan anak.

Kata Kunci: organisasi internasional, pernikahan anak, Republik Dominika, SDGs, UNICEF

Abstract

This journal seeks to learn more about UNICEF's initiatives as an international organization in reducing cases of child marriage that occurred in the Dominican Republic. In analyzing these efforts the author uses the concept of roles and functions of international organizations and the concept of gender in the Sustainable Development Goals. This research finds that in its efforts to tackle child marriage cases in the Dominican Republic, UNICEF is playing its role as an instrument by helping the Dominican Republic government to aggregate and articulate its interests in achieving the SDGs. As an instrument, UNICEF carries out its information function by assisting the statistical agency of the Dominican Republic in providing data on

child marriage cases through the 2014 MICS-ENHOGAR, 2018 CAP-MIUT and 2019 MICS-ENHOGAR surveys. Meanwhile, as an arena UNICEF carries out the policy implementation function by providing a place for countries in Latin America and the Caribbean region with regional programs related to child marriage. In carrying out its role as an actor, UNICEF carries out the socialization function with a C4D-based campaign and entertainment-based education by making the film La Peor Novela with the theme of child marriage. As an actor, UNICEF also carries out the function of norms by encouraging the government of the Dominican Republic to change the minimum limit for marriage in its Civil Code. These roles and functions cannot be separated from the moral authority possessed by UNICEF to influence the Dominican Republic in making policies in dealing with child marriage cases

Keyword: *child marriage, Dominican Republic, international organizations, SDGs, UNICEF*

Kontak Penulis

Ayu Eva Sattvika Devi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan Seroja No. 39, Kota Denpasar, Bali, Kode Pos: 80239

Telp: 081238624988 Fax: -

E-mail : evasattvika3@gmail.com

PENDAHULUAN

Kasus pernikahan anak dan kasus pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks yang berkaitan erat dengan isu-isu ketidaksetaraan gender, kemiskinan, putus sekolah, dan kasus kehamilan anak perempuan dibawah umur. Kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu kawasan dengan kasus pernikahan anak tertinggi di dunia. Pada kawasan Amerika Latin dan Karibia ini angka kasus pernikahan anak dan pernikahan dini mengalami penurunan yang signifikan dengan angka yang cenderung stagnan selama 25 tahun terakhir (UNICEF, 2019). Pada kawasan ini juga menempati urutan kedua sebagai negara dengan kasus kehamilan pada remaja terbanyak kedua di dunia. Sebanyak 1 dari 4 anak perempuan di kawasan Latin Amerika dan Karibia yang mengalami pernikahan anak atau pernikahan dini sebelum usia mereka menginjak 18 tahun (UNICEF, 2019).

Republik Dominika menjadi negara dengan kasus pernikahan anak terbesar di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Menurut laporan dari UNICEF, sebanyak 37% anak perempuan telah berumah tangga sebelum mereka berulang tahun ke-18 dan 12% menikah sebelum mereka berulang tahun ke-15 di negara ini (UNICEF, 2019). Bahkan menurut badan pusat statistik Republik Dominika selama tahun 2001-2018 telah terdapat sebanyak 8.009 kasus pernikahan anak dengan rentang usia 14-17 tahun yang telah tercatat di kantor sipil nasional Republik Dominika (UNICEF & *Ministerio de Educacion de la Republica Dominicana*, 2021). Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan anak dan pernikahan dini di Republik Dominika, salah satunya adalah kemiskinan (Girls Not Brides, April 2017).

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan anak dan pernikahan dini di Republik Dominika, salah satunya adalah kemiskinan (Girls Not Brides, April 2017). Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama terjadi pernikahan anak

perempuan di Republik Dominika, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar bagi masalah ekonomi yang dihadapi. Selain itu, dorongan dari orang tua yang mendukung pernikahan anak juga menjadi salah satu faktor pendorong maraknya kasus pernikahan anak perempuan di negara ini. Pada kebanyakan kasus, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki dewasa yang dianggap mapan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Padahal usia yang terpaut jauh antara suami dan istri sering kali mengarah ke dalam kekerasan dalam rumah tangga (UNICEF, 2019).

Selain faktor kemiskinan, undang-undang hukum perdata Republik Dominika juga bersifat kurang adil dan dalam hukum perdata ini belum diatur mengenai *early union* yang kerap terjadi di negara ini. Menurut artikel 144 hukum perdata Republik Dominika, batas usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 18 tahun sedangkan pada perempuan adalah 15 tahun (*Codigo Civil De La Republica Dominicana*, 2007). Dalam pasal 144 hukum perdata yang belum diamandemen ini juga menunjukkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Republik Dominika, dengan perbedaan usia minimal untuk menikah antara anak laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya aturan hukum yang mengizinkan anak perempuan untuk menikah minimal usia 15 tahun ini menyebabkan kasus pernikahan anak di Republik Dominika kebanyakan dialami oleh anak perempuan. Menurut laporan dari UNICEF, 36% anak perempuan yang berusia dibawah 18 tahun telah mempunyai anak di Republik Dominika (UNICEF, 2019). Oleh karena itu, kasus pernikahan anak di Republik Dominika perlu mendapat perhatian lebih.

Menyikapi maraknya kasus pernikahan anak dan *early union* di Republik Dominika, UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak memperjuangkan hak anak berupaya mengurangi kasus pernikahan anak dan *early union* yang terjadi di Republik Dominika. *United Nations International Children's Fund*

(UNICEF) adalah organisasi internasional yang termasuk organisasi di bawah PBB yang didirikan pada tanggal 11 Desember tahun 1946 di Kota New York, Amerika Serikat karena pengaruh dari adanya Perang Dunia II (Dwiyani, et. al: 2015). UNICEF merupakan organisasi yang bergerak dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan demi perkembangan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi negara-negara yang sedang berkembang yang mempunyai misi untuk memperjuangkan hak-hak anak.

Sebagai organisasi yang bergerak dibawah PBB, UNICEF juga ikut serta dalam mencoba merealisasikan SDGs. Salah satu target dari SDGs tersebut adalah target 5.3.1 yang berbunyi "*Eliminate child or early or forced marriage by 2030*" (UNICEF, 2019). Untuk itu, UNICEF berusaha untuk mengeliminasi segala bentuk praktek pernikahan anak, pernikahan paksa dan pernikahan dini yang terjadi di berbagai belahan dunia.

UNICEF mulai memberikan perhatian lebih di Republik Dominika mulai tahun 2019, UNICEF memprioritaskan kesetaraan gender dan hak-hak anak. Kasus pernikahan anak dan *early union* yang terjadi di Republik Dominika menyebabkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, masa kanak-kanak yang harusnya digunakan untuk bermain, belajar dan mencoba hal baru terenggut karena adanya pernikahan anak dan *early union* ini. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional yang berjuang memperjuangkan hak-hak anak berusaha untuk menjalankan perannya dengan mengupayakan penurunan kasus pernikahan anak di Republik Dominika.

Kajian pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini berfokus pada tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan isu pernikahan anak yang ditangani oleh organisasi internasional. Disini penulis menggunakan dua jurnal penelitian. Literatur pertama berasal dari e-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Mulawarman, Vol.8 No.1, tahun 2021 yang berjudul "*Upaya*

UNICEF dengan Pemerintah Niger dalam Menangani Pernikahan anak tahun 2013-2017." yang ditulis oleh Crisnatali Lolita Sitompul. Literatur kedua berasal dari jurnal perspektif Vol.1, No. 3 yang ditulis oleh Herviyandha dan Asep Kamaluddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Veteran Jakarta, dengan judul "*Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak di Indonesia Periode 2014-2017.*" Kedua literatur ini sama-sama membahas mengenai upaya yang dilakukan UNICEF untuk memerangi kasus perkawinan anak yang terjadi Niger dan di Indonesia, periode penelitiannya pun juga berdekatan yakni pada periode 2013-2014 dan 2014-2017.

Dalam kedua penelitian ini juga terdapat kesamaan pada metode yang digunakan, keduanya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencari data, menganalisis hingga menyajikan isu yang diangkat. Selain itu, dalam kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan konsep organisasi internasional untuk memahami studi kasus yang diangkat. Baik di Niger maupun di Indonesia, UNICEF bersama pemerintah nasional bekerja sama untuk memerangi kasus pernikahan anak yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF di kedua negara ini adalah dengan membentuk berbagai program yang mengurangi kasus pernikahan anak yang terjadi dan mencegah terjadinya kasus pernikahan anak di kedua negara ini. Selain membuat program-program, UNICEF juga melaksanakan berbagai kampanye untuk menghentikan praktik pernikahan anak yang terjadi di kedua negara ini.

Kedua literatur ini berkontribusi membantu penulis memahami bagaimana penerapan konsep organisasi internasional pada upaya yang dilakukan UNICEF dalam memerangi pernikahan anak di dua negara yang berbeda. Selain itu, literatur ini juga membantu penulis dalam memahami gambaran umum karakteristik UNICEF khususnya dalam hal menangani kasus pernikahan anak. Kedua literatur ini menggunakan teori organisasi

internasional dan juga konsep pernikahan anak. Berbeda dengan kedua jurnal tersebut, kali ini penulis akan menambahkan kajian gender dalam SDG's disamping konsep fungsi dan peran organisasi internasional sebagai unsur kebaruan penelitian. Disamping itu, dalam penelitian ini juga memperoleh hasil analisis yang berbeda mengingat upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF tentunya mengalami perubahan akibat adanya evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Setiap negara tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga UNICEF pasti akan menyesuaikan program-program yang diterapkan agar sesuai dengan karakteristik masyarakat supaya nilai yang dibawa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan UNICEF di kedua negara ini cenderung hanya memfokuskan pada dunia pendidikan dan sosialisasi kepada remaja. Sementara dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan juga upaya yang dilakukan UNICEF yang programnya lebih mudah masuk ke masyarakat, contohnya melalui kampanye lewat dunia hiburan untuk menangkap lebih banyak perhatian.

Penulis memakai konsep peran dan fungsi organisasi internasional yang menjelaskan mengenai kerja sama antara organisasi internasional dengan negara anggota dalam hal ini mengenai peran UNICEF di Republik Dominika. Organisasi internasional merupakan struktur formal yang terbentuk melalui perjanjian dari para anggotanya, yang menjadi anggota organisasi internasional ini bisa negara atau bukan negara yang mempunyai tujuan yang sama (Archer, 2001: 2). Organisasi internasional merupakan lembaga yang penting dalam sistem internasional. Menurut Archer (2001: 68-85), terdapat tiga peran utama organisasi internasional diantaranya; sebagai instrument, arena dan aktor. Organisasi internasional juga memiliki 9 fungsi yakni, fungsi agregasi dan artikulasi, fungsi menghasilkan norma, fungsi rekrutmen, fungsi sosialisasi, fungsi pembuatan kebijakan, fungsi penerapan keputusan, fungsi penyelarasan

kebijakan, fungsi tempat memperoleh informasi dan fungsi operasionalisasi.

Menurut Samuel J. Barkin dalam bukunya *International Organization*. Organisasi internasional memiliki otoritas moral yang dapat memengaruhi negara-negara anggotanya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh organisasi internasional tersebut. Otoritas moral adalah kekuatan organisasi internasional untuk secara sah berbicara sebagai suara internasional resmi yang sehubungan dengan bidang isunya untuk membuat orang maupun negara memperhatikannya (Barkin, 2006:23). Dalam otoritas moral menyediakan dua rute suatu organisasi internasional diberdayakan yakni kemampuan untuk malu dan informasi.

Konsep peran dan fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer dan otoritas moral organisais internasional menurut Barkin ini akan digunakan penulis untuk menjelaskan secara spesifik bagaimana peran dan fungsi organisasi internasional dalam membantu negara untuk menyelesaikan permasalahan nasional di negaranya. Peran UNICEF kepada pemerintah Republik Dominika akan menjadi elemen utama dari penelitian ini yang akan berfokus pada isu pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika.

Dalam menganalisis upaya yang dilakukan oleh UNICEF, penulis akan menggunakan ketiga konsep peran organisasi internasional yakni sebagai instrumen, arena dan aktor dengan lima fungsi organisasi internasional, yakni fungsi artikulasi dan agregasi, fungsi tempat memperoleh informasi, fungsi penerapan kebijakan, fungsi sosialisasi, dan fungsi menghasilkan norma. Penulis hanya menggunakan 5 dari 9 fungsi organisasi internasional karena menurut temuan sementara dari fenomena yang diangkat, yakni upaya UNICEF dalam mengurangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika hanya mencerminkan 5 fungsi dari organisasi internasional, yakni fungsi artikulasi dan agregasi, fungsi tempat memperoleh informasi,

fungsi penerapan kebijakan, fungsi sosialisasi dan fungsi menghasilkan norma.

Konsep kedua adalah konsep gender dalam SDGs. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) di deklarasikan pada UN Sustainable Summit tanggal 25 September 2015 yang diadopsi dari “*Transforming Our World Agenda for Sustainable Development*” yang merupakan dokumen resmi agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Salah satu tujuan dari SDGs ini adalah terciptanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender terdapat pada SDGs tujuan ke-5, yakni *achieve gender equality and empower all women and girls* yang berisi 9 target dan 14 indikator. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini tidak hanya merupakan tujuan dari agenda *SDGs*, tetapi juga pengantar menuju pembangunan yang berkelanjutan (UN Women, 2018: 4). Konsep SDG tujuan 5 ini membantu penulis untuk menganalisis bagaimana suatu organisasi internasional berupaya untuk menyelesaikan tujuan ke-5 SDG dan target-target dalam SDGs ini. Dalam permasalahan yang penulis angkat, yakni pernikahan anak sendiri telah tercantum ke dalam konsep SDGs tujuan ke-5 target ke-3 yakni, *end all harmful practices, such as child, early, and forced marriage and female genital mutilation*. Dalam indikator 5.3.1 dengan jelas tercantum penghapusan terhadap pernikahan anak dan *early union* sebelum usia 15 tahun dan 18 tahun.

METODE

Dalam penelitian mengenai upaya UNICEF dalam mengurangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini menggambarkan masalah yang akan dibahas secara general terlebih dahulu. Setelah proses penggambaran masalah, dilanjutkan dengan proses menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan yang akan diolah dan disusun dengan menggunakan teori serta konsep yang

akan digunakan, supaya akan memunculkan sebuah *novelty* atau kebaruan.

Dalam penulisan tulisan ini memakai data yang didapatkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai macam material yang berhubungan dengan objek penelitian. Sehingga untuk memahami gejala sentral tersebut penulis mencari data dalam literatur-literatur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan negara yakni Republik Dominika sebagai unit analisis sedangkan UNICEF sebagai unit eksplanasi yang dikaji. Hubungan antara unit eksplanasi dan unit analisis tergolong ke dalam analisis induksionis karena unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan unit analisisnya. Hal ini dikarenakan UNICEF merupakan organisasi sistem global yang posisinya berada pada tingkat yang lebih tinggi dari Republik Dominika sebagai negara-bangsa. Dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data dengan dokumen, lebih spesifiknya mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi, buku, berita dan publikasi. Penulis mengumpulkan data dengan teknik *internet searching* dengan melakukan penelusuran di situs-situs resmi di internet dan juga dengan mengunduh dokumen-dokumen yang didapatkan dari situs-situs resmi tersebut.

Setelah data penelitian telah dikumpulkan, data akan dianalisis lebih dalam yang bertujuan untuk memfokuskan dengan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan penulis. Untuk melakukan analisis data tersebut, penulis menggunakan teknik koding. Dalam menganalisis data, penulis mengelompokkan upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam memerangi kasus pernikahan anak yang terjadi ke dalam beberapa kategori yang tergolong peran instrument, arena dan aktor, dan juga fungsi agregasi, artikulasi, penyediaan informasi, penerapan kebijakan, fungsi penyalarsan kebijakan, fungsi sosialisasi dan fungsi menghasilkan norma yang dilakukan oleh UNICEF dalam upayanya mencoba merealisasikan konsep kesetaraan gender dalam SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pernikahan Anak di Republik Dominika

Kasus pernikahan anak di Republik Dominika sebagian besar disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang menormalkan terjadinya pernikahan anak, terutama pada anak perempuan yang berusia 15 tahun keatas. Nilai-nilai yang tersebar di masyarakat menganggap kewajiban seorang anak perempuan adalah untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik semakin memperburuk keadaan. Mandat sosial masyarakat juga menganggap usia yang ideal untuk menikah adalah 17-21 tahun. Padahal, usia 17 tahun masih tergolong anak-anak dan tidak cukup dewasa untuk menikah. Selain itu, masyarakat juga menganggap pernikahan anak bukan merupakan isu utama yang perlu untuk diselesaikan. Mereka beranggapan bahwa isu lainnya seperti penggunaan alkohol, narkoba dan masalah pengangguran lebih penting untuk diatasi. Padahal, kasus pernikahan anak ini juga penting untuk ditangani karena pernikahan anak memiliki dampak yang buruk bagi perekonomian, kesetaraan gender, kesehatan, hingga populasi penduduk.

Pernikahan anak merupakan segala bentuk perkawinan baik secara formal atau informal yang salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mempunyai dampak yang buruk bagi individu maupun masyarakat. Pernikahan anak bahkan telah menjadi salah satu agenda pembangunan global tepatnya pada target 5.3.1 SDGs. Republik Dominika menjadi salah satu negara dengan kasus pernikahan anak terbanyak di dunia, menurut data dari UNICEF, pada tahun 2014 terdapat sebanyak 36% dari perempuan yang berusia 20-24 tahun telah menikah pada usia dibawah 18 tahun. Sementara pada laki-laki dengan rentang usia 20-24 tahun hanya 8% diantaranya yang menikah dibawah usia 18 tahun. Pernikahan anak yang terjadi di

Republik Dominika ini kebanyakan memang dialami oleh perempuan. Sebagai negara dengan pendapatan menengah keatas, kasus pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika ini setara dengan yang terjadi di kawasan Sub Sahara dan Afrika (UNICEF,2019). Republik Dominika juga menjadi negara dengan kasus pernikahan anak terbanyak di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Di Republik Dominika lebih dari satu pertiga wanita menikah sebelum mereka berusia 18 tahun dan satu dari 5 wanita telah melahirkan sebelum menginjak usia yang ideal untuk melahirkan (ENHOGAR MICS, 2014).

Relasi Kuasa antara Pemerintah Republik Dominika dan UNICEF

Menurut Samuel J. Barkin dalam bukunya *International Organization*, Organisasi internasional memiliki otoritas moral yang dapat memengaruhi negara-negara anggotanya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh organisasi internasional tersebut. Dalam otoritas moral menyediakan dua rute suatu organisasi internasional diberdayakan yakni kemampuan untuk malu dan informasi. Bersamaan dengan otoritas moral, sumber kekuatan utama lainnya dari organisasi internasional adalah kontrol terhadap politik internasional melalui kemampuan untuk menyediakan informasi (Barkin, 2006:24). Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Barkin dalam bukunya *International Organization*, dalam perannya membantu Republik Dominika menangani kasus pernikahan anak yang terjadi UNICEF diberdayakan untuk mempermalukan Republik Dominika melalui penyediaan informasinya mengenai kasus pernikahan anak yang terjadi dalam hal ini UNICEF menjalankan perannya sebagai instrumen, aktor dan arena.

Menurut Barkin, negara yang berdaulat mempunyai kekuatan tertentu yang dapat diekspresikan melalui pembentukan dan pengelolaan organisasi internasional (Barkin, 2006:18). Negara sebagai aktor hubungan internasional menggunakan organisasi

internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya (Bayu, et.al : 2019). Melihat UNICEF yang memang bergerak di bidang memperjuangkan hak-hak anak, Republik Dominika berusaha untuk menggunakan UNICEF sebagai instrumen yang digunakan untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya melalui membentuk badan-badan resmi yang memang bergerak untuk penghapusan praktik pernikahan anak dan terciptanya agenda pembangunan berkelanjutan global nasional Republik Dominika. Hal ini dibuktikan dengan strategi pembangunan nasional Republik Dominika yang sebagian besar telah sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global (UNSDG, 2023).

Organisasi internasional dapat memengaruhi negara dengan menyediakan informasi (Barkin, 2006:24). Dalam hal ini organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor maupun arena. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat melakukan sosialisasi sementara sebagai arena organisasi internasional dapat menjadi forum penyebaran informasi antar anggotanya. Organisasi internasional dalam hal ini UNICEF menyediakan informasi yang berkaitan dengan kasus pernikahan anak yang terjadi dengan diadakannya survei dan sosialisasi mengenai kasus pernikahan anak yang terjadi.

Kerja Sama UNICEF dan Pemerintah Republik Dominika dalam Mewujudkan Agenda SDGs

Sebagai organisasi internasional yang termasuk salah satu agen dari PBB, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Republik Dominika untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan juga komitmen hak asasi manusia internasional yang ditandatangani oleh Republik Dominika. Program-program nasional ini juga berkaitan erat dengan *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF). Program-program UNICEF kebanyakan mencoba untuk membantu usaha nasional dari Republik Dominika untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global yang

berhubungan dengan hak-hak anak dengan memfokuskan ke area-area kritis dan juga pada area-area UNICEF dapat memaksimalkan dampaknya dalam berkontribusi membantu pemerintah nasional.

Dalam memerangi kasus pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika, UNICEF bekerja dengan kerangka sosio-ekologisnya untuk mempermudah diterimanya nilai-nilai anti pernikahan anak di Republik Dominika. Kerangka sosio-ekologis ini bergerak pada berbagai lapisan sehingga memudahkan tindakan-tindakan dan juga program-program yang dibuat oleh UNICEF. Kerangka sosio-ekologis UNICEF terbagi ke dalam beberapa macam tingkatan yakni; (1) Pada tingkat individu, (2) Pada tingkat interpersonal, (3) Pada tingkat komunitas, (4) Pada tingkat intutional atau organisasi, (5) Pada tingkat hukum dan peraturan publik. Menurut UNICEF, faktor lingkungan itu menentukan perubahan sosial dan perilaku. Oleh karena itu UNICEF melakukan pendekatan di berbagai tingkatan untuk memahami faktor penentu perilaku, mendeteksi kesenjangan komunikasi di seluruh tingkatan, dan mengatasinya dengan pendekatan terintegrasi (Gillespie et.al., 2016; UNICEF, 2018).

Peran UNICEF sebagai Instrumen

Pemerintah Republik Dominika berusaha untuk merealisasikan Sustainable Development Goals. Hal ini buktikan dengan dibentuknya komisi tingkat tinggi yang bergerak di pembangunan berkelanjutan yang bekerja sama dengan institusi nasional, komisi dan sub-komisi yang bertugas memantau, menyebarkan dan menyokong pembangunan berkelanjutan nasional. Sebanyak 70% dari strategi pembangunan nasional Republik Dominika telah memiliki keselarasan dengan agenda SDGs 2030. Pemerintah Republik Dominika juga telah menyiapkan rencana untuk mempercepat pencapaian agenda-agenda dalam SDGs seperti *zero hunger, end of poverty, quality education, sustainable production and consumption* dan *gender equality*.

Pernikahan anak merupakan isu yang berkaitan erat dengan isu kesetaraan gender yang juga memengaruhi dan dipengaruhi oleh kemiskinan dan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Dominika berusaha mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan nasionalnya dalam memerangi kasus pernikahan anak yang terjadi dengan bantuan dari UNICEF. UNICEF telah bekerja sama dengan badan-badan nasional seperti PROSOLI (Progresando con Solidaridad) yang merupakan badan khusus yang bergerak pada pembangunan manusia dan penumpasan kemiskinan, ONE (Oficina Nacional de Estadística) badan pusat statistic Republik Dominika, dan kementerian pendidikan Republik Dominika dalam menanggulangi isu pernikahan anak yang terjadi.

Menjalankan fungsi tempat memperoleh informasi

Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki fungsi sebagai sarana memperoleh informasi, terutama informasi mengenai anak-anak dan juga perempuan. Dalam program-program untuk mengurangi kasus pernikahan anak sendiri UNICEF menggunakan program berbasis bukti, sehingga sebelum merencanakan program-programnya UNICEF melakukan survei untuk mengetahui kondisi dan memperdalam informasi terkait dengan pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika. Di Republik Dominika UNICEF telah melakukan survei dengan berbagai indikator yang berkaitan dengan kasus pernikahan anak yang terjadi. Untuk data keseluruhan dari berbagai indikator UNICEF telah melakukan MICS sebanyak 2 kali yakni pada tahun 2014 dan 2019. Sementara untuk survei mengenai sikap dan perilaku masyarakat mengenai pernikahan anak, UNICEF sendiri telah melakukan CAP-MIUT pada tahun 2018. Informasi-informasi yang diperoleh oleh UNICEF melalui survei ini nantinya akan mendorong Republik Dominika untuk mengambil tindakan terkait kasus pernikahan anak yang terjadi.

Peran UNICEF sebagai Arena

Dalam menjalankan perannya sebagai arena, UNICEF menjalankan fungsinya sebagai penerapan kebijakan. Dalam hal ini UNICEF menyediakan tempat bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia dalam *Accelerate Action to End Child Marriage in Latin America and The Caribbean* yang didalamnya terdapat program *Joint Inter-Agency Program to End Child Marriage and Early Union in Latin America and the Caribbean 2018-2021*. Program regional ini diluncurkan pada Oktober 2017 yang berpuncak pada Hari Anak Perempuan Internasional. Dalam program regional ini berusaha untuk mentransformasikan norma kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan juga mempromosikan kerangka hukum dan politik untuk menghentikan praktik pernikahan anak yang terjadi di kawasan Amerika Latin dan Karibia ini. Norma internasional biasanya dinisiasikan oleh negara dan komunitas internasional saat penandatanganan perjanjian, konvensi, deklarasi dan *communiqué*, melalui penandatanganan ini negara didorong oleh sesama anggotanya untuk menegakkan norma internasional di negara masing-masing (Arijayanti, et.al: 2023). Tujuan dari adanya program ini adalah untuk memprakarsai aksi regional dan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk pernikahan anak dan *early union* secara holistik dan komprehensif. Hal ini diperlukan untuk tidak hanya mencapai konsensus penting tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga memikirkan kembali strategi saat ini yang menjadi fenomena yang menyebabkan terjadinya kehamilan dini dan kekerasan berbasis gender.

Peran UNICEF sebagai Aktor

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor, UNICEF berupaya menjalankan fungsi sosialisasi dan fungsi penghasil norma. Organisasi internasional dapat memengaruhi sistem kepercayaan dan pola perilaku dari individu suatu negara dengan adanya sosialisasi (Archer, 2001:100). Dalam upaya

yang dilakukan UNICEF dalam mengurangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika dilakukan dengan mengadakan kampanye berbasis *entertainment* dan program pelatihan pada sekolah-sekolah menengah di Republik Dominika. UNICEF menggunakan strategi C4D (*Communication for Development*) yang merupakan salah satu bagian dari SBCC (*Social and Behavior Change Communication*). C4D merupakan salah satu strategi UNICEF yang berbasis bukti yang merupakan bagian integral dari program yang memanfaatkan perpaduan alat komunikasi, *channel*, dan pendekatan untuk memfasilitasi dialog, partisipasi, dan keterlibatan dengan anak, keluarga, komunitas dan jaringan untuk perubahan sosial dan perilaku yang positif baik dalam konteks pembangunan maupun kemanusiaan (UNICEF, 2018: 8). Sementara SBCC umumnya berperan penting dalam desain strategi komunikasi dalam program pembangunan yang banyak menampilkan pendidikan dan hiburan (Obregon.et.al., 2021: 138).

Strategi C4D merupakan komunikasi berbasis hiburan berdasarkan model sosial-ekologis yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap, norma dan perilaku sosial masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kekerasan berbasis gender dengan memproduksi sebuah serial drama atau *Soap Opera* yang berjudul *La Peor Novela* atau dalam bahasa Indonesia berarti "serial televisi terburuk". Cerita dari *La Peor Novela* menggambarkan kondisi yang dialami oleh anak perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan norma-norma yang selama ini beredar di masyarakat yang mendukung adanya pernikahan dini. Cerita ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa pilihan untuk melaksanakan pernikahan dini kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekerasan, ekonomi, dan tekanan dari orang tua.

Selain melalui strategi C4D UNICEF juga membentuk program pelatihan pada anak dan remaja di sekolah-sekolah menengah. Dalam

program ini berfokus pada pelatihan ke tenaga pendidik maupun psikologis di lingkungan sekolah. Dalam program pelatihan ini berisi panduan teknik-teknik untuk pengembangan aktivitas yang dapat menghentikan praktik pernikahan anak. Dalam program pelatihan ini UNICEF menyediakan video dan poster dan juga seperangkat kuisisioner yang berguna untuk mengukur dampak dari intervensi yang dilakukan (UNICEF & *Ministerio de Educacion de la Republica Dominicana*, 2021).

Program pelatihan ini merupakan pengalaman pertama kementerian pendidikan dan UNICEF dalam menangani permasalahan pernikahan anak dan *early union* di bidang pendidikan. Program pelatihan ini pertama kali dilakukan di provinsi San Cristobal dengan 11 sekolah menengah sebagai *pilot project* dengan tujuan untuk menyadarkan siswa sekolah menengah mengenai dampak dari pernikahan dini dan *early union* melalui pendekatan perubahan perilaku (UNICEF & *Ministerio de Educacion de la Republica Dominicana*, 2019). Selain menjalankan fungsi sosialisasi, UNICEF juga menjalankan fungsi penghasil norma dalam upaya yang dilakukan dalam mengurangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika. Kampanye, sosialisasi dan penyediaan informasi mengenai pernikahan anak dan *early union* yang sebelumnya telah dilakukan oleh UNICEF berhasil mendorong pemerintah Republik Dominika untuk membuat keputusan Kongres yang melarang segala bentuk pernikahan anak dibawah usia 18 tahun. Pasal 144 kitab undang-undang hukum perdata Republik Dominika yang sebelumnya membatasi usia minimal bagi anak perempuan untuk menikah adalah 15 tahun dan laki-laki adalah 18 tahun hendak dirubah melalui Undang-Undang No.1-21 yang mengubah dan mencabut berbagai ketentuan KUH Perdata yang melarang pernikahan antara laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun tanpa pengecualian. Pada 18 November 2020, Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara bulat menyetujui penghapusan dan modifikasi pada kitab KUH Perdata yang menciptakan celah hukum bagi pernikahan anak dengan izin

orang tua dan perintah khusus yang dikeluarkan oleh hakim (IJM, 2021). Keputusan Kongres Nasional Republik Dominika ini akhirnya disetujui oleh Presiden Luis Abinader pada 6 Januari 2021.

Peran UNICEF dalam Membantu Republik Dominika Menangani Kasus Pernikahan Anak

Dalam peran-peran organisasi internasional yang telah disebutkan diatas menunjukkan adanya keselarasan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Barkin dalam bukunya *International Organization*. Menurut Samuel J Barkin, organisasi Internasional memiliki otoritas moral yang dapat memengaruhi negara-negara anggotanya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh organisasi internasional tersebut. Namun, Barkin juga menjelaskan bahwa organisasi internasional tidak dapat menggantikan peranan negara. Organisasi internasional hanya bertindak sebagai agen, kedaulatan negara tetap tidak dapat diganggu gugat atau diintervensi oleh organisasi internasional. (Barkin, 2006: 6). Dengan penyediaan informasi oleh UNICEF dalam perannya sebagai instrumen, mendorong pemerintah Republik Dominika untuk menganggap isu pernikahan anak ini perlu diselesaikan. Dengan adanya informasi yang mudah didapatkan karena adanya survei yang dilakukan oleh UNICEF juga menyebabkan masyarakat dan negara-negara lainnya mengetahui isu pernikahan anak yang sedang terjadi di Republik Dominika yang menyebabkan negara ini merasa malu dengan isu pernikahan anak yang terjadi.

Akibatnya, pemerintah Republik Dominika berusaha untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingannya untuk menangani kasus pernikahan anak yang terjadi dengan bantuan dari UNICEF yang memang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak anak dan Republik Dominika sendiri juga telah bekerjasama dengan UNICEF sejak tahun 1952. Dalam mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingannya ini,

Republik Dominika memiliki otoritas dan kewenangannya sendiri. UNICEF hanya bergerak sebagai agen yang membantu Republik Dominika untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya mengenai kasus pernikahan anak yang terjadi.

PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan mengenai kasus pernikahan anak dan *early union* di Republik Dominika serta upaya UNICEF dalam mengurangi kasus pernikahan anak menunjukkan adanya kesuaian antara konsep peran dan fungsi organisasi internasional yang disampaikan oleh Clive Archer dan Samuel J. Barkin dan juga konsep kesetaraan gender dalam SDGs. Dalam upaya yang dilakukan dalam mengurangi kasus pernikahan anak yang terjadi, UNICEF menjalankan ketiga perannya sebagai organisasi internasional yakni peran instrumen, arena dan aktor yang dalam peran ini UNICEF juga menjalankan fungsinya sebagai artkulasi dan agregasi, penerapan kebijakan, fungsi memperoleh informasi, fungsi menghasilkan norma dan fungsi sosialisasi UNICEF mampu menjalankan ketiga peran ini karena UNICEF sebagai organisasi internasional mempunyai otoritas moral yang dapat memengaruhi negara dalam pengambilan kebijakannya. Namun, kedaulatan yang dimiliki oleh Republik Dominika juga tidak dapat diganggu gugat sehingga UNICEF disini hanya berperan sebagai agen yang memengaruhi tindakan yang diambil oleh Republik Dominika. Dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pernikahan anak di Republik Domika UNICEF sebagai organisasi internasional juga berperan dalam membantu Republik Dominika mencapai agenda pembangunan berkelanjutan global (SDGs) khususnya pada indikator 5.3.1 yakni *eliminate all harmful practices such as early and forced marriage and female genital mutilation by 2030*.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). *International Organization*. Taylor & Francis e-Library. <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6b57d0db-228d-4354-a01d-b7ca774a3320>
- Arijayanti, Ni Made Putri; Dewi, Putu Ratih Kumala; Prameswari, A.A Ayu Intan. *Strategi Greenpeace Mewujudkan Nol Deforestasi di Indonesia (Studi Kasus Pabrik Asia Pulp an Paper Riau)*. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional).[S.l.], v. 2, n. 2, p. 354-367, jan. 2023. ISSN 2828-1853. Tersedia pada:<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/86895>>. Tanggal akses: 26 Juni 2023.
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization : Theories and Institution 2nd edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bappenas. (2017). *Terjemahan Tujuan & Target Global: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Bayu, Nyoman Bagus; Sushanti, Sukma; Suwecawangsa; Putu Adi Putra. *Signifikansi Amerika Serikat di WTO dalam Kasus Anti Dumping Ayam Broiler Tiongkok*. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). [S.l.], v. 1, n. 1, june 2019. ISSN 2828-1853. Tersedia pada: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/50516>>. Tanggal akses: 26 Juni 2023.
- Dominican Republic. *Republica Dominicana.Codigo Civil De La Republica Dominicana*. (1930). Civil Codes (1800-1923).8. https://ecollections.law.fiu.edu/civil_codes/8 . Diakses pada 1 Maret 2023.
- Dwiyani, Made Ayu Mella; Priadarsini, Ni Wayan Rainy; Prameswari, A.A Ayu Intan. *Peran UNICEF dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Nigeria*. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). [S.l.], v. 1, n. 03, oct. 2015. ISSN 2828-1853.Tersedia pada: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15671>>. Tanggal akses : 26 Juni 2023.
- Girls Not Brides. (17 April 2017). *7 Reasons Why Child Marriage persist in the Dominican Republic*. <https://www.girlsnotbrides.org/articles/7-reasons-child-marriage-persists-dominican-republic/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2017.
- IJM. (2021). *Dominican Republic President Approves Bill to End Child Marriage*. <https://ijm.org.au/news/dominican-republic-president-approves-bill-to-end-child-marriage/>. Diakses pada 12 Maret 2023.
- Kamaluddin & Herviyandha. (2022). *Peran United Nations Children's Fund dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak di Indonesia Periode 2014-2017*. Jurnal Perspektif, Vol.1, No.3, Hal. 251-263.
- Masoed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. p. 43-58.
- Obregon, et al. (2021) .L. B. Frank, P. Falzone (eds.), *Entertainment-Education Behind the Scenes*. Palgrave Mac Milan : New York. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_9
- Plan International. (2021). *How We Got Child Marriage Banned in Dominican Republic*. <https://plan-international.org/blog/2021/01/21/how-we-got-child-marriage-banned-in-dominican-republic/>. Diakses pada 12 April 2023
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.Grasindo <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sitompul,C. (2020). *Upaya UNICEF dengan Pemerintah Niger dalam Menangani Pernikahan Anak Tahun 2013-2017*. *E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.8. No.2, Hal. 526-540.
- UNICEF. (2018). *Married Girls Live "The Worst Soap Opera" : A Communication Campaign to Eradicate Child Marriage and Early Union by UNICEF in Dominican Republic*. <https://www.unicef.org/lac/en/stories/married-girls-live-worst-soap-opera>. Diakses pada 6 Maret 2023.
- UNICEF.(2021). *Child Marriage*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>. Diakses pada 15 November 2022
- UNICEF. (2019). *Country Annual Report 2019 : Dominican Republic*. <https://www.unicef.org/media/90501/file/Dominican-Republic-2019-COAR.pdf>. Diakses pada 15 November 2022
- UNICEF. (2020). *Country Annual Report 2020 : Dominican Republic*. <https://www.unicef.org/media/100626/file/Dominican-Republic-2020-COAR.pdf>. Diakses pada 15 November 2022

- UNICEF. (2021). *Country Annual Report 2021 : Dominican Republic*.
<https://www.unicef.org/media/115966/file/Dominican-Republic-2021-COAR.pdf>. Diakses pada 15 November 2022
- UNICEF & PROSOLI. (2019). *El Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas : Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en seis municipios de la República Dominicana*.
- UNICEF & Ministerio de Educacion de la Republica Dominicana. (2021). *Guia Para la Prevencion de las Uniones Tempranas en la Ambito Escolar : Pautas Para el Personal de Orientacion y Psicologia de Centros Educativos*.
- UNICEF. (2019). *A Profile of Child Marriage and Early Unions*.
<https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:44110cdd-328b-4b53-a5b2-d0636a79b234>. Diakses Pada 15 November 2022.
- UNICEF & Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2021). ENHOGAR-MICS Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2019, Informe de resultados de la encuesta. Santo Domingo, República Dominicana
- UNICEF & Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2016). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014, Informe Final. Santo Domingo, República Dominicana
- UNICEF & Ministerio de Educacion de la Republica Dominicana. (2019). *Herramienta Educativa para la Prevencion del Matrimonio Infantil y la Uniones Tempranas (MIUT) en 11 centros de secundaria de San Cristobal*.
- UN Women.(2018). *Why Gender Equality Matters Across All SDGs*.
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2018/SDG-report-Chapter-3-Why-gender-equality-matters-across-all-SDGs-2018-en.pdf>. Diakses pada 16 Desember 2022.
- United Nations. (2022). *Goal 5 / Department of Economic and Social Affairs*.
<https://sdgs.un.org/goals/goal5>. diakses pada tanggal 17 Desember 2017.
- UNICEF.(2018). *La Peor Novela*.
<https://www.unicef.org/dominicanrepublic/la-peor-novela>. Diakses pada 9 Maret 2023